

DAMPAK PENGALIHAN PERTOKOAN PANCOR MENJADI TATA RUANG TERBUKA PUBLIK TERHADAP KEADAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN PANCOR

Nadia Meylani¹, Wahidin², Ida Ayu Putri Suprapti³

^{1,2,3}Universitas Mataram

Corresponding Author: nadiameylani5@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengalihfungsian pertokoan Pancor menjadi Ruang Terbuka Publik (RTP) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Keabsahan diuji dengan triangulasi, sedangkan analisis mengikuti model interaktif Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan dampak sosial positif berupa meningkatnya partisipasi, interaksi sosial lebih terbuka, serta rasa aman bagi pengunjung. Secara ekonomi, pendapatan pedagang meningkat dan daya beli membaik, meski peluang kerja baru terbatas dan transisi awal menurunkan aktivitas ekonomi lokal. Secara keseluruhan, masyarakat merespons kehadiran RTP Pancor secara positif, meskipun masih muncul harapan agar kebijakan pembangunan lebih berpihak kepada pedagang kecil dan masyarakat lokal agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa pembangunan ruang terbuka publik tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan estetika kawasan, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang saling terkait. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan perlu disertai dengan pemberdayaan masyarakat serta perlindungan bagi kelompok yang paling rentan menghadapi perubahan.

Kata kunci: Alih fungsi lahan, Ruang terbuka publik, Dampak sosial ekonomi

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, salah satunya melalui penyediaan lingkungan hidup yang sehat, aman, dan layak huni sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H (1) UUD 1945. Dalam hal ini, penataan ruang menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Habermas (1989) memandang ruang publik sebagai arena diskursus yang menuntut aksesibilitas, inklusivitas, dan rasionalitas tiga prinsip yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang. Stephen Carr (1992) menambahkan bahwa ruang publik bukan sekadar wadah fisik, melainkan arena kehidupan bersama yang membangun rasa memiliki warga. Sementara itu, Jan Gehl (2007) menegaskan bahwa kualitas sebuah kota ditentukan oleh tingkat partisipasi warganya.

Ruang terbuka publik karenanya tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai medium yang memperkuat inklusivitas, meningkatkan kohesi sosial, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat perkotaan. Kehadirannya terbukti mampu menekan kesenjangan sosial, memperkuat rasa aman, serta mendorong kesehatan fisik dan mental masyarakat (Pulungan, 2024). Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan strategi adaptif, salah satunya melalui pengalihfungsian kawasan komersial menjadi ruang terbuka publik. Dalam literatur alih fungsi lahan, Barlowe (1978) lebih awal menyoroti pergeseran alokasi lahan yang mengikuti nilai guna dan nilai ekonomi. Pemikiran ini kemudian diperkaya oleh Friedmann (1989) yang menekankan bahwa transformasi kawasan tidak hanya persoalan fisik, melainkan juga arah pembangunan kota yang menentukan wajah sosial dan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan itu, Ostrom (1990) menambahkan pentingnya tata kelola kolektif sumber daya agar proses perubahan ruang tetap berpihak pada kepentingan bersama.

Kabupaten Lombok Timur, sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Nusa Tenggara Barat dengan kepadatan penduduk 3.171 jiwa/km² (BPS NTB, 2023), menghadapi tantangan yang sama. Kecamatan Selong, pusat pemerintahan sekaligus kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, semakin membutuhkan ruang terbuka publik untuk menyeimbangkan tekanan urbanisasi (Khairunisa *et al.*, 2023). Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah daerah merevitalisasi kawasan pertokoan Pancor yang telah lama menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal, menjadi Ruang Terbuka Publik Pancor pada tahun 2021 (Andita, 2021). Transformasi ini menimbulkan dinamika sosial dan ekonomi yang berlapis. Di satu sisi, RTP Pancor dipandang sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata ruang kota, memperluas akses warga terhadap ruang publik, serta mendukung pemulihan pasca pandemi (Angan, 2023). Secara tata ruang, perubahan dari pertokoan ke ruang publik juga menandai pergeseran "*nodus*" aktivitas kota. Sejak awal, Maclver (1931) dan Sorokin (1937) telah menekankan bahwa dinamika struktur sosial selalu bergerak mengikuti perubahan peran, interaksi, dan harapan warga. Pemikiran ini menemukan relevansinya dalam konteks kota, di mana setiap pergeseran fungsi ruang berimplikasi langsung pada pola kehidupan masyarakat. Lynch (1964) kemudian mempertegas dengan pandangannya bahwa citra kota dibangun oleh *node, edge, dan path*; ketika *node* mengalami perubahan fungsi, maka ritme serta persepsi kota pun ikut bergeser. Dengan demikian, perubahan fungsi pertokoan menjadi ruang publik tidak hanya berdampak pada susunan fisik tata ruang, tetapi juga membentuk ulang pola interaksi sosial yang terjalin di dalamnya.

Fenomena alih fungsi lahan semacam ini telah banyak dikaji dalam berbagai konteks. Prihatin (2015) menunjukkan bahwa di kota besar seperti Bandung dan Yogyakarta, pengalihfungsian ruang kerap menimbulkan ketegangan antara kebutuhan ruang publik dan keberlangsungan ekonomi lokal. Di Vietnam, Ha *et al.*, (2016) menemukan bahwa konversi lahan pertanian untuk pembangunan kota membuka peluang ekonomi baru, namun sekaligus menciptakan kerentanan sosial. Drescher *et al.*, (2016) menegaskan bahwa perubahan tata guna hutan hujan tropis bukan hanya berdampak ekologis, tetapi juga sosial-ekonomi

masyarakat. Temuan serupa juga terlihat pada studi Uncegbu *et al.*, (2017). Rangkaian temuan ini memperlihatkan pentingnya menimbang keadilan spasial, kapabilitas warga, dan tata kelola kolaboratif, agar manfaat ruang publik tidak timpang pada kelompok tertentu saja.

Di Indonesia, studi Haris *et al.*, (2018) menyoroti bagaimana alih fungsi lahan pertanian di Malang berpengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi desa, sementara Ardhiansyah *et al.*,(2019) menunjukkan keterkaitan erat antara perubahan tata guna lahan dengan perkembangan kawasan komersial di Kampung Prawirotaman Yogyakarta. Lebih baru, Renaldi *et al.*,(2023) mengungkap adanya dampak sosial ekonomi dari pembangunan ruang terbuka hijau di Solok Selatan. Khairunisa *et al.*,(2023) secara khusus meneliti pengalihfungsian pertokoan Pancor menjadi RTP, meskipun penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek kebijakan dan perencanaan, bukan pengalaman sosial-ekonomi masyarakat secara langsung.

Dari tinjauan tersebut, tampak bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti alih fungsi lahan dari sisi ekologis, tata guna, serta kebijakan pembangunan. Kajian yang langsung menggambarkan pengalaman masyarakat menghadapi transformasi ruang dari pusat ekonomi tradisional menjadi ruang terbuka publik masih terbatas, khususnya dalam konteks lokal seperti Pancor.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menangkap pengalaman langsung masyarakat terdampak, sehingga memberikan pemahaman mengenai bagaimana transformasi ruang berimplikasi terhadap pola interaksi sosial, solidaritas komunitas, serta keberlangsungan mata pencaharian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam konsekuensi sosial dan ekonomi dari pembangunan Ruang Terbuka Publik Pancor bagi masyarakat Kelurahan Pancor, sekaligus merefleksikan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan prinsip inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam perencanaan kota di Indonesia. Pertanyaan yang mendasari penelitian ini adalah bagaimana pengalihan fungsi pertokoan Pancor menjadi ruang terbuka publik memengaruhi kondisi sosial masyarakat, serta sejauh mana perubahan tersebut berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi lokal.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, Menurut Moleong (2018) pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan sedangkan metode deskriptif merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka (Ghony & Fauzan, 2016), pendekatan kualitatif dengan metode Deskriptif dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan, hal ini karena peneliti ingin mengetahui secara alamiah dan apa adanya. Lokasi penelitian berada di RTP Pancor, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif *Miles dan*

Huberman yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Sosial

Temuan penelitian pada aspek sosial mengungkap sejumlah perubahan yang terjadi pasca-pengalihan fungsi pertokoan Pancor menjadi Ruang Terbuka Publik (RTP), sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Partisipasi masyarakat meningkat

Warga dari berbagai kalangan mulai aktif memanfaatkan ruang terbuka ini, baik untuk kegiatan santai, olahraga, maupun acara bersama.

2. Interaksi sosial lebih terbuka

Keberadaan RTP membuat warga lebih sering bertemu dan berkomunikasi, sehingga hubungan antarwarga terasa lebih akrab.

3. Rasa aman dan nyaman tercipta

Pengunjung merasa lebih terlindungi dan tenang saat berada di area RTP, sehingga suasananya menjadi ramah untuk semua kelompok usia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi pertokoan Pancor menjadi Ruang Terbuka Publik (RTP) membawa transformasi sosial yang signifikan. Partisipasi masyarakat tumbuh, interaksi sosial menjadi lebih inklusif, dan rasa aman semakin kuat. Hal ini sejalan dengan pandangan Otto Soemarwoto, (1983) bahwa pembangunan tidak hanya memengaruhi fisik, tetapi juga perilaku masyarakat; terbukti warga Pancor tidak sekadar menerima pasif, melainkan beradaptasi aktif dengan ruang baru. Irfan Islamy (2002) menegaskan bahwa setiap kebijakan memiliki konsekuensi, yang di Pancor tampak melalui terciptanya ruang sosial lebih terbuka dan hidup. Selaras dengan itu, JE. Hosio (2007) melihat dampak sebagai perubahan perilaku nyata, tercermin dalam pergeseran aktivitas dari ruang dagang ke ruang publik yang memicu pola komunikasi baru.

Temuan ini juga menguatkan pandangan Robert M. MacIver (1931) bahwa perubahan sosial adalah pergeseran relasi, dari transaksi ekonomi menuju interaksi lintas usia dan status. Sejalan dengan Pitirim Sorokin (1937), perubahan tersebut bersifat berkelanjutan dan memunculkan komunitas baru yang menghidupkan RTP. Kingsley Davis (1949) menekankan pertemuan faktor eksternal dan internal, terlihat ketika warga bukan hanya menunggu kebijakan, tetapi aktif mengisi RTP dengan kegiatan ekonomi, olahraga, dan sosial. Pandangan Gillin dan Gillin (1950) pun terbukti, karena ruang yang awalnya hanya jalur lalu lintas kini menjadi pusat interaksi lintas generasi. Arnold Toynbee (1987) menambahkan bahwa masyarakat merespons perubahan dengan kreativitas, terlihat dari inovasi warga mengadakan kegiatan informal hingga sosial-budaya. Akhirnya, seperti ditegaskan Agus Suryono (2019), perubahan sosial selalu menggeser nilai dan cara pandang; RTP Pancor kini tidak sekadar taman, melainkan simbol keterbukaan dan kebersamaan. Dengan demikian, dampak sosial

positif ini tidak muncul secara otomatis, melainkan bergantung pada respons adaptif masyarakat dan dukungan kebijakan yang mengiringi proses transisi.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini tidak ditemukan dampak sosial negatif yang signifikan:

1. Adanya kebutuhan nyata akan ruang publik yang lebih terbuka
2. Peningkatan kualitas interaksi sosial
3. Letak strategis menumbuhkan rasa aman dan nyaman
4. Perubahan yang diterima sebagai peluang

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak sosial positif ini muncul karena masyarakat cepat beradaptasi dengan kondisi baru, didorong oleh kebutuhan akan ruang interaksi yang lebih manusiawi dan terbuka. Proses ini mencerminkan bagaimana perubahan ruang dapat memperkuat solidaritas sosial ketika direspons secara aktif oleh masyarakat.

Dampak Ekonomi

Temuan penelitian pada aspek ekonomi mengungkap sejumlah perubahan yang terjadi pasca-pengalihan fungsi pertokoan Pancor menjadi Ruang Terbuka Publik (RTP), sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Pendapatan pedagang meningkat

Keberadaan pengunjung yang terus bertambah membawa keuntungan langsung bagi pedagang kecil di sekitar RTP.

2. Daya beli masyarakat ikut membaik

Karena akses terhadap barang dagangan semakin mudah dan variatif, terutama makanan dan kebutuhan harian yang ditawarkan di area tersebut.

3. Peluang kerja baru masih terbatas

Meski ruang ini ramai, kesempatan kerja tambahan belum berkembang signifikan.

4. Masa transisi sempit berat

Saat relokasi pedagang lama dilakukan tanpa dukungan kebijakan pendampingan yang jelas, aktivitas ekonomi sempat menurun sebelum akhirnya kembali stabil.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari alih fungsi pertokoan Pancor menjadi RTP bersifat ganda. Di satu sisi, pendapatan pedagang meningkat dan daya beli masyarakat membaik, namun di sisi lain peluang kerja baru masih terbatas dan aktivitas ekonomi sempat melemah pada masa transisi. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Soemarwoto (1983) bahwa pembangunan selalu menghadirkan dua sisi (manfaat bagi sebagian, tetapi juga potensi kerugian bagi pihak lain). Hal ini juga sejalan dengan Islamy (2002) yang melihat dampak sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan, dan JE. Hosio (2007) yang menekankan perubahan perilaku sebagai bentuk respons adaptif warga, tercermin dari munculnya usaha-usaha baru dan pola perdagangan informal di Pancor.

Lebih lanjut, Ir. Ali Kabul Mahi (2016) mengingatkan bahwa pembangunan tidak cukup berhenti pada estetika, tetapi harus memastikan kesejahteraan masyarakat lokal. Pertanyaan

John Friedmann tentang “*siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan*” menjadi relevan, sebab meskipun sebagian pedagang memperoleh keuntungan, akses terhadap peluang ekonomi baru belum merata. Kritik David Harvey (1973) mengenai bias pembangunan perkotaan pada aspek estetika juga tercermin di Pancor, di mana pedagang kecil kurang terlindungi. Pandangan ini berkelindan dengan gagasan Elinor Ostrom (1990) tentang perlunya pengelolaan partisipatif, yang di Pancor belum sepenuhnya hadir.

Selain itu, Amartya Sen (1999) menekankan pembangunan sejati sebagai perluasan kapabilitas masyarakat, namun akses kesempatan masih belum setara. Hal ini diperkuat oleh Doreen Massey (2005) yang melihat ruang sebagai arena relasi sosial-ekonomi; di Pancor, perubahan fungsi ruang memang melahirkan relasi baru berbasis usaha informal, meski keberlanjutannya masih rapuh.

Dengan demikian, pembangunan RTP Pancor memperlihatkan dinamika ekonomi yang kompleks yakni membuka peluang sekaligus menyisakan tantangan. Dampak positif dapat dirasakan langsung, tetapi agar manfaatnya lebih merata, kebijakan lanjutan perlu diarahkan pada pendampingan, perlindungan pedagang kecil, dan penguatan kapabilitas masyarakat lokal.

Berikut adalah beberapa alasan yang menjelaskan mengapa dalam penelitian ini ditemukan dampak ekonomi yang bersifat ganda bagi masyarakat:

1. Letak strategis RTP Pancor yang menciptakan peluang ekonomi baru
2. Ketiadaan kebijakan pendampingan yang memadai
3. Transisi yang belum diiringi perencanaan relokasi yang matang
4. Perbedaan kapasitas adaptasi masyarakat
5. Fokus kebijakan lebih dominan pada estetika kawasan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa munculnya dampak ekonomi yang ganda dari pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) Pancor bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Kondisi ini merupakan hasil pertemuan antara faktor internal, seperti kesiapan dan kapasitas adaptasi masyarakat, serta faktor eksternal, seperti arah kebijakan pembangunan dan minimnya pendampingan pada masa transisi.

Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa setiap kebijakan pembangunan ruang publik selalu membawa wajah ganda, menciptakan manfaat nyata bagi sebagian pihak, namun juga memunculkan risiko dan hambatan bagi pihak lain. Oleh karena itu, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata, sangat penting bagi kebijakan selanjutnya untuk tidak hanya berfokus pada perubahan fisik semata, tetapi juga memberi ruang bagi pendampingan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan keberpihakan kepada kelompok yang paling rentan menghadapi perubahan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak pengalihfungsian lahan pertokoan

Pancor menjadi Ruang Terbuka Publik (RTP) Pancor terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat Pancor, dapat disimpulkan bahwa perubahan ini membawa dinamika yang beragam. (1) Alih fungsi lahan pertokoan menjadi Ruang Terbuka Publik (RTP) Pancor membawa dampak sosial yang dominan positif. Partisipasi masyarakat meningkat, interaksi sosial menjadi lebih terbuka, dan tercipta rasa aman serta kenyamanan bagi seluruh kalangan. RTP tidak sekedar menggantikan pertokoan, tetapi bertransformasi menjadi ruang bersama yang memperkuat solidaritas sosial. (2) Dari aspek ekonomi, dampak yang muncul bersifat ganda. Pendapatan pedagang meningkat dan daya beli masyarakat membaik, namun peluang kerja baru masih terbatas dan aktivitas ekonomi lokal sempat melemah pada masa transisi akibat relokasi pedagang lama tanpa pendampingan memadai. (3) Respons masyarakat terhadap pembangunan RTP cenderung positif. Berbeda dengan temuan penelitian terdahulu yang menyoroti sisi negatif alih fungsi lahan, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Pancor relatif adaptif dalam memaknai perubahan sebagai peluang baru. (4) Secara umum, RTP Pancor tidak hanya mengubah wajah fisik kota, tetapi juga membentuk ulang dinamika sosial-ekonomi. Namun, manfaat pembangunan baru akan terasa adil dan berkelanjutan apabila diiringi kebijakan pendampingan yang mendukung pedagang kecil, memperkuat ekonomi lokal, dan memberi ruang bagi kelompok rentan.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi, berikut beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait agar manfaat pembangunan RTP Pancor dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan: (1) Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan pendampingan bagi pedagang kecil melalui penyediaan tempat berdagang resmi, akses modal, serta pelatihan keterampilan usaha, sekaligus melibatkan warga sejak perencanaan hingga pengelolaan RTP. (2) Masyarakat diharapkan memanfaatkan RTP tidak hanya sebagai ruang rekreasi, tetapi juga untuk interaksi sosial dan aktivitas ekonomi, dengan tetap menjaga kebersihan dan rasa memiliki terhadap ruang publik. (3) Dunia akademik dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan dalam kajian dampak sosial-ekonomi pengalihfungsian lahan, khususnya perubahan dari kawasan pertokoan menjadi ruang publik. (4) Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah kajian, jumlah informan, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed-method agar hasil lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan antara lain: (1) Jumlah informan terbatas, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh masyarakat terdampak. (2) Pendekatan kualitatif deskriptif memberikan pemahaman mendalam, tetapi tidak menghasilkan data kuantitatif yang dapat digeneralisasi. (3) Data banyak bergantung pada keterbukaan informan, yang bisa dipengaruhi subjektivitas pengalaman pribadi. Keterbatasan ini telah diminimalkan melalui triangulasi data dan observasi langsung, sehingga hasil penelitian tetap valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Andita, R. A. (2021). Relokasi Mulus, Ruang Terbuka di Eks Pertokoan Lama Pancor Segera

- Terwujud. *Lombok Post*. <https://lombokpost.jawapos.com/selong/1502779957/relokasi-mulus-ruang-terbuka-di-eks-pertokoan-lama-pancor-segera-terwujud>
- Angan, U. (2023). *Pembangunan RTP Tahap Dua Berlanjut , Segini Anggaran yang Disiapkan Dinas PUPR Lotim*. NTB POS. <https://ntbpos.haluankita.com/berita/pr-5157460810/pembangunan-rtp-tahap-dua-berlanjut-segini-anggaran-yang-disiapkan-dinas-pupr-lotim#:~:text=Dinas PUPR Lotim akan melanjutkan pembangunan>
- Ardhiansyah, N., Ayu, D., Widyastuti, R., & Septiari, E. D. (2019). *Perubahan tata guna lahan kampung Prawirotaman kota Yogyakarta sebagai dampak keberadaan kawasan komersial*. 1755(Koentjaraningrat 1993), 131–138.
- B, E. U. ., N, U. S., C, E. O., I, A. J., & I, O. L. (2017). *THE IMPACT OF OPEN SPACE CONVERSION ON THE SOCIO-ECONOMIC*. April.
- Barlowe, R. (1978). *Land resource economics. The economics of real estate*.
- Carr, S. (1992). *Public space*. Cambridge University Press.
- Davis, K. (1949). *Human society*.
- Drescher, J., Rembold, K., Allen, K., Beckscha, P., Buchori, D., Clough, Y., Faust, H., Fauzi, A. M., Gunawan, D., Hertel, D., Irawan, B., Jaya, I. N. S., Klarner, B., Kleinn, C., Knohl, A., Kotowska, M. M., Krashevskaya, V., Krishna, V., Leuschner, C., ... Scheu, S. (2016). *Ecological and socio-economic functions across tropical land use systems after rainforest conversion*.
- Friedmann, J. (1989). Planning in the public domain: discourse and praxis. *Journal of Planning Education and Research*, 8(2), 128–130.
- Gehl, J. (2007). Public spaces for a changing public life. In *Open space: People space* (pp. 23–30). Taylor & Francis.
- Gillin, J. L. (1950). *Cultural Sociology: By John Lewis Gillin.[and] John Philip Gillin*. Macmillan.
- Ha, T., Nguyen, T., Tran, V. T., Thanh, Q., & Huy, Q. (2016). Land Use Policy Socio-economic effects of agricultural land conversion for urban development : Case study of Hanoi , Vietnam. *Land Use Policy*, 54, 583–592. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.02.032>
- Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere. *The MIT Press*, 11, 6–10.
- Haris, A., Subagio, L. B., Santoso, F., & Wahyuningtyas, N. (2018). Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Media Komunikasi Geografi*, 19(1), 114. <https://doi.org/10.23887/mkg.v19i1.13967>
- Harvey, D. (1973). *Social Justice in the City*. 336.
- Hosio, J. E. (2007). Kebijakan Publik Dan Desentralisasi Esai Dari Sorong. *Yogyakarta: Laksbang*.
- Islamy, M. I. (2002). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*.

- Khairunisa, A., Firmansyah, M., & Salmah, E. (2023). Analisis Pengalihfungsian Pertokoan Pancor Menjadi Ruang Terbuka Publik Di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Konstanta*, 2(1), 131–143. <https://doi.org/10.29303/konstanta.v2i1.397>
- Lynch, K. (1964). *The image of the city*. MIT press.
- Maclver, R. M. (1931). *Society: its structure and changes*.
- Mahi, I. A. K. (2016). *Pengembangan Wilayah: Terori & Aplikasi*. Kencana.
- Massey, D. B. (2005). *For space*.
- NTB, B. (2023). *Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Di Ntb tahun 2023*. <https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg%253D%253D/penduduk-kabupaten-kota.html>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge university press.
- Prihatin, R. B. (2015). ALIH FUNGSI LAHAN DI PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG DAN YOGYAKARTA) Urban Land Misuse: (A Case Study of Bandung City and Yogyakarta City). *Aspirasi*, 6(2), 105–118.
- Pulungan, A. (2024). Arsitektur dan Penggunaan Ruang Publik : Membangun Lingkungan yang Ramah Pengguna. *Writebox : Teknik Arsitektur*, 1, 1–14.
- Renaldi, Z., Akbar, W. K., & Wijaya, W. (2023). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Solok Selatan. ... *Akuntansi ...*, 3(1), 7–12. <https://jurnal.pustakagalerimandiri.co.id/index.php/pustakaaktifa/article/view/591%0Ahttps://jurnal.pustakagalerimandiri.co.id/index.php/pustakaaktifa/article/download/591/354>
- Sen, A. (1999). Development as freedom (1999). *The Globalization and Development Reader: Perspectives on Development and Global Change*, 525.
- Soemarwoto, O. (1983). *A New Approach in Reforestation and Erosion Control in Indonesia*.
- Sorokin, P. A. (1937). *Social and Cultural Dynamics...: Fluctuation of systems of truth, ethics, and law* (Vol. 2). American Book Company.
- Suryono, A. (2019). *Teori dan strategi perubahan sosial*. Bumi Aksara.
- Toynbee, A. J. (1987). *A study of history: volume I: abridgement of volumes I-VI* (Vol. 1). Oxford Paperbacks.